

MENJAGA SUARA DEMOS

Tantangan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024

Rafif Pamenang Imawan

Peneliti, Populi Center

raimwn@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat partisipasi politik pada pemilu yang tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hasil survei nasional oleh Populi Center di bulan Oktober 2022 menunjukkan tingginya keinginan warga negara untuk menggunakan hak politiknya pada pemilu 2024 mendatang. Persoalannya pelaksanaan pemilu mendatang dihantui oleh persoalan data pemilih yang selalu mengalami persoalan menentukan daftar pemilih tetap (DPT), terutama dalam proses pencocokan dan penelitian (Coklit), maupun proses menggabungkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan DPT pemilu terakhir. Artikel pendek ini hendak menjawab pertanyaan, faktor-faktor apa yang menyebabkan persoalan data pemilih tidak dapat terselesaikan dari pemilu ke pemilu di Indonesia. Argumentasi dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pada data sekunder berupa data yang berasal dari dokumen resmi lembaga, data pemilu dan artikel di internet, serta studi-studi terkait data pemilih. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat persoalan institusional yang disebabkan oleh kapasitas pemerintahan di tingkat pusat dan daerah terkait dengan pendataan penduduk. Di masa mendatang perlu untuk dibuka ruang implementasi satu warga negara satu nomor identitas (*identity number*) serta perlunya pendekatan sosial-budaya dan teknologi untuk menjamin kepercayaan pada data (reliabilitas) dalam proses pendataan.

Kata kunci: Teknologi, Desentralisasi, Kapasitas Institusional

Abstract

Indonesia is a country with high level of political participation in elections compared to other Southeast Asian countries. The results of national survey by the Populi Center in October 2022 showed the high interest of citizens to exercise their political rights in the upcoming 2024 elections. The potential problem is that the implementation of the upcoming election is prone to voter data issues which creates problems in determining the final voter list (DPT), especially in the process of matching and research (Coklit), as well as the process of combining the List of Potential Electoral Voters (DP4) with the DPT for the last election. This short article aims to answer the question on what are the factors that cause voter data issues remain to be unresolved from election to election in Indonesia. The argument in this article utilises a qualitative approach based on secondary data in the form of data originating from official institutional documents, election data and articles on the internet, as well as studies related to voter data. The results of the study show that there are institutional problems caused by government capacity at the central and regional levels related to population data collection. In the future, it is necessary to create an opportunity on the implementation of election by using data on one citizen with one identity number and the need for a socio-cultural and technological approach to ensure trust in data (reliability) in the data collection process.

Keywords: Technology, Decentralization, Institutional Capacity

A. Pendahuluan

Ketika para sarjana ilmu politik pemerintahan hendak melihat kualitas demokrasi di sebuah negara, maka salah satu tolak ukur yang akan dilihat pertama kali ada pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di negara tersebut. Cara pandang tersebut tidak berubah ketika para sarjana ilmu politik pemerintahan banyak membahas gelombang demokrasi ketiga di masa tahun 1900-an hingga ketika praktik demokrasi telah berkembang pesat dengan kehadiran media sosial.¹ Meski tidak berubah, terdapat pergeseran perhatian dari para sarjana ilmu politik, dari semula memperhatikan rutin tidaknya pelaksanaan pemilu, berubah menjadi seberapa berkualitas/berintegritas pemilu tersebut.²

Artikel ini mencoba mengelaborasi kualitas pelaksanaan pemilu di Indonesia, terutama dari aspek partisipasi politik dengan fokus utama pada data pemilih. Persoalan pendataan pada dasarnya merupakan persoalan teknis, sama seperti persoalan administratif lain seperti pengadaan logistik, petugas yang tidak terlatih dengan prosedur yang ada, kerusakan mesin e-voting (bagi negara yang menerapkan e-voting), surat suara rusak, dan proses tata laksana pemilu yang berlarut-larut.³ Dalam diskursus mengenai pemilu berintegritas (*electoral integrity*) masalah data pemilih merupakan salah satu indikator penting dalam konsepsi mengenai pemilu berintegritas.

¹ Pada dekade tersebut, gelombang demokratisasi menjadi topik bahasan yang menarik banyak perhatian para sarjana ilmu politik, mulai dari Samuel Huntington, Guillermo O'Donnell, hingga Larry Diamond. Beberapa dari banyaknya sarjana ilmu politik tersebut menekankan pada bagaimana situasi geo-politik berpengaruh terhadap munculnya negara-negara demokratis baru. Gelombang termasuk masuk ke kawasan Asia Tenggara, menariknya dari banyaknya wilayah di dunia, negara-negara Arab tidak terkena gelombang demokratisasi. Baru setelahnya pada dekade 2010-an, terdapat beberapa negara yang tumbang rezim otoritarianisme-nya. Kajian-kajian terbaru terkait dengan demokrasi secara umum kini menempatkan bagaimana media sosial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi, termasuk salah satu diantaranya wacana penggunaan e-voting. Lihat: Samuel P Huntington. *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma press, 1993.; Larry Diamond, et al. (ed.). *Consolidating the third wave democracies*. JHU Press, 1997.; Hernán Pablo Toppi. Guillermo O'Donnell and his contribution to the development of democracy in Latin America since the third wave of democratization. *Revista IUS*, 2018, 12.42: 9-28.; Rex Brynen, et al. *Beyond the Arab spring: authoritarianism & democratization in the Arab world*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2012.

² Pemilu telah menjadi norma global apabila kita membicarakan manifestasi demokrasi. Persoalannya, meski telah menjadi norma global, masih banyak terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan, salah satu diantara pelanggaran tersebut yang jamak dilakukan adalah manipulasi suara dan politik uang. Di luar aspek-aspek tersebut, apakah pelaksanaan pemilu juga tanpa adanya intimidasi. Kita dapat melihat bagaimana pelaksanaan pemilu di negara-negara Afrika, misalnya, masih banyak diwarnai oleh kekerasan pada pelaksanaannya. Lihat: Pippa Norris. *The new research agenda studying electoral integrity*. *Electoral Studies*, 2013, 32.4 hal.564

³ Pippa Norris, Alessandro Nai (ed.). *Election watchdogs: transparency, accountability and integrity*. Oxford University Press, 2017.

Ketika kita membahas basis data pemilih, maka rujukan kita akan mengacu pada pemilu 2004. Pemilu tersebut merupakan pemilu langsung yang pertama kali dilakukan. Hampir tidak ada sengketa pada pelaksanaan pemilu tersebut, mengingat data penduduk dan pemilih bersumber dari data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Data ini dikumpulkan melalui sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kesulitan ada pada bagaimana mengonversi basis data yang didasarkan pada blok sensus, diubah menjadi basis yang didasarkan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama mengingat TPS didasarkan pada kategorisasi RT/RW. Pada pemilu di tahun-tahun berikutnya, basis data yang menjadi acuan adalah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Di sinilah titik persoalannya, mengingat basis data tidak lagi dari awal, dan tidak lagi pendaftaran (input baru), melainkan pemutakhiran data.⁴ Pemutakhiran data ini membutuhkan kemampuan pemerintahan untuk secara tertib melakukan pembaharuan data di lapangan.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa terdapat persoalan institusional terkait dengan pendataan pemilih. Meski demikian, persoalan-persoalan apa saja yang sebenarnya menjadi faktor yang hingga persoalan data pemilih tidak dapat terselesaikan dari pemilu ke pemilu di Indonesia. Pertanyaan tersebut yang coba untuk dijawab artikel singkat ini. Argumentasi dalam artikel ini disusun menggunakan data sekunder berupa data yang berasal dari dokumen resmi lembaga, data pemilu dan artikel di internet, serta studi-studi terkait data pemilih. Artikel ini menggunakan metode analisa kualitatif dengan cara melakukan analisa dokumen sebagai pendekatan utama.

B. Permasalahan

Data pemilih sering kali menjadi obyek sengketa pemilu, baik itu pada pemilu di tingkat nasional maupun pemilu di tingkat lokal. Pada tingkat nasional, pemilu tahun 2014 dan 2019 diwarnai dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dari Prabowo Subianto selaku kontestan yang pada dua pemilu tersebut kalah dari Joko Widodo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Kala itu, khususnya pada pemilu 2014, Prabowo Subianto menuding terdapat praktik kecurangan dalam pemilu yang terstruktur,

⁴ Nano Suharno, Pilkada, Data Penduduk, dan Pemilih, <https://news.detik.com/kolom/d-5192666/pilkada-data-penduduk-dan-pemilih>, 29 September 2020

sistematis, dan masif (TS). Salah satu argumentasi kecurangan ada pada mobilisasi pemilih melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKtB).⁵ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan data pemilih dapat berpengaruh besar pada legitimasi pemilu.

Di sisi lain, hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center di bulan Oktober 2022 menunjukkan tingginya tingkat keinginan warga negara untuk turut berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Data menunjukkan 73,8 persen masyarakat telah mengetahui Pemilihan Umum Serentak (Pileg dan Pilpres) akan dilaksanakan pada tahun 2024, sementara itu masyarakat yang tidak mengetahui sebanyak 26,2 persen. Pada pertanyaan lanjutan terkait partisipasi, jumlah masyarakat yang menyatakan akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak 2024 mendatang cukup besar yakni sebesar 97 persen.⁶ Hasil ini sekaligus hendak mengkonfirmasi studi terkait perbandingan tingkat partisipasi di Asia Tenggara yang menekankan bahwa demokrasi di Indonesia menjadi cukup bermakna dikarenakan tingkat partisipasi yang tinggi.⁷ Potensi ini akan rusak apabila persoalan data pemilih masih menjadi persoalan menahun di pemilu-pemilu di Indonesia.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, kondisi kesulitan pada data pemilih tersebut turut tergambar dari kesulitan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang berusaha untuk melakukan penelitian dan pencocokan (coklit) daftar pemilih, banyak diusir oleh warga hingga viral di media sosial.⁸ Pada konteks yang berbeda, kita melihat bagaimana kasus korupsi dari Lukas Enembe, Gubernur Papua, yang kediamannya dijaga ketat oleh para simpatisan dengan senjata panah.⁹ Dua kejadian tersebut menunjukkan paling tidak terdapat persoalan sosial-kultural yang perlu untuk

⁵ CNN Indonesia, Gugatan Prabowo ke MK di 2014 dan 2019, Serupa tapi Tak Sama, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190612132836-32-402673/gugatan-prabowo-ke-mk-di-2014-dan-2019-serupa-tapi-tak-sama>, 13 Juni 2019

⁶ Populi Center, Evaluasi 3 Tahun Kinerja Joko Widodo - KH. Ma'ruf Amin dan Dinamika Politik Menjelang Pemilu 2024, <https://populicenter.org/2022/10/26/evaluasi-tiga-tahun-kinerja-joko-widodo-kh-maruf-amin-dan-dinamika-politik-menjelang-pemilu-2024/>, 19 Oktober 2022

⁷ Scott Schraufnagel, Michael Buehler, & Maureen Lowry-Fritz. Voter turnout in democratizing Southeast Asia: A comparative analysis of electoral participation in five countries. Taiwan Journal of Democracy, July. 2014.

⁸ Nano Suharno, Pilkada, Data Penduduk, dan Pemilih, <https://news.detik.com/kolom/d-5192666/pilkada-data-penduduk-dan-pemilih>, 29 September 2020

⁹ Detik, Tetap Kondusif KPK Periksa Lukas Enembe Meski Dijaga Simpatikan Berpanah, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6386758/tetap-kondusif-kpk-periksa-lukas-enembe-meski-dijaga-simpatikan-berpanah>, 4 November 2022

ditangani, terutama bagaimana supaya inisiasi-inisiasi memperkuat pemilu yang berintegritas mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Antara Kelembagaan hingga SDM

Berdasarkan penelusuran kajian-kajian yang ada, apabila dikategorikan ke dalam beberapa kategori, persoalan mengenai data pemilih dapat masuk ke dalam beberapa faktor berikut.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Persoalan pemutakhiran data di kota Medan di tahun 2018 menunjukkan persoalan manajemen SDM, terutama berkaitan dengan aspek evaluasi proses pengambilan data di lapangan.¹⁰ Fungsi lain selain fungsi pengambilan data adalah fungsi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hak-hak politik dasar warga negara.¹¹ Persoalan lain ada pada kurang telitinya PPDP dalam memasukkan data.¹² Faktor kesalahan manusia ini dapat menjadi faktor krusial, mengingat pengelolaan data membutuhkan ketelitian dan keterampilan dalam mengelola data yang banyak dan besar.

2. Pemekaran Wilayah & Desentralisasi

Faktor lain ada pada birokrasi dan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah memberikan hambatan-hambatan administratif, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian antara data pada pemerintah pusat dan daerah.¹³ Kebijakan desentralisasi seharusnya dapat mendekatkan pelayanan ke masyarakat, namun pada praktiknya, desentralisasi tidak selalu berimbang dengan meningkatnya kualitas pelayanan. Dalam banyak hal, desentralisasi justru untuk mengakomodasi elite lokal.¹⁴

¹⁰ Proses evaluasi seharusnya menekankan pada tolak ukur kinerja yang jelas, terutama juga berkaitan dengan apa indikator kinerja yang digunakan. Lihat: Muhammad Husni Thamrin, Muhammad Arifin Nasution, & Faiz Albar Nasution. *Problematic Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan*. Jurnal Sosial Politik, 2020, 6.2: 157-167.

¹¹ Weriza, Asrinald, & Ermita Arif. *Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada di Kota Padang Panjang*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 2019, 20.2: 213-222.

¹² Rahmad Nuryadi Putra & Hasanuddin. *Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015*. 2017. PhD Thesis. Riau University.

¹³ *ibid*

¹⁴ Mardyanto Wahyu Tryatmoko. *Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pascaorde Baru. Masyarakat Indonesia*, 2017, 38.2: 269-296.

3. *Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan*

Persoalan daftar pemilih sangat berkaitan dengan bagaimana pendataan penduduk, oleh karenanya dalam hal ini Kemendagri menjadi lembaga yang bertanggung jawab, terutama berkaitan dengan perekaman E-KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).¹⁵ Dalam beberapa kasus, seperti di provinsi Lampung, beberapa pemangku kebijakan pemilu bahkan tidak turun lapangan untuk turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.¹⁶

4. *Minimnya Partisipasi Masyarakat*

Pada perhelatan demokrasi seperti pemilu, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama sebagai unsur yang melakukan verifikasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹⁷ Dalam hal ini, maka Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) memiliki peran penting untuk turut mendorong aktifnya partisipasi pemilih. Kehadiran lembaga BAWASLU merupakan struktur yang unik, mengingat tidak terdapat struktur serupa di dalam sistem pemilihan di negara lain.

5. *Celah Regulasi*

Butuh untuk dilakukan penataan regulasi, terutama terkait dengan siapa yang akan melakukan pembaharuan data pemilih, terutama apabila berkaca pada pasca pelaksanaan pemilu tahun 2019. Pasca pemilu, UU 7/2017 belum mengatur siapa aktor-aktor yang akan melakukan pemutakhiran data.¹⁸

Sengkarut Data Pemilih

Hasil penelusuran beberapa literatur menunjukkan bahwa terdapat persoalan ini teknologi yang memegang peranan penting dalam persoalan pemutakhiran data pemilih. Faktor

¹⁵ Rahmad Nuryadi Putra & Hasanuddin. *Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015*. 2017. PhD Thesis. Riau University.

¹⁶ Nico Kresna Wibowo, Rahayu Sulistiawati, & Eko Budi Sulistio. Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak di Indonesia (Studi di Kota Bandar Lampung Tahun 2019). *Jurnal Administrativa*, 2020, 2.1: 45-62.

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Muhammad Imam Subhki. Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 2020, 16.2: 137-154.

tersebut seperti kemampuan kelembagaan hingga kompetensi SDM. Faktor non teknologi ini tentu akan kerap ditemukan, meski rekapitulasi data pemilih telah dilakukan dengan menggunakan teknologi.

Apabila kita melihat bagaimana desain tahapan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 (tabel 1), maka fokus koordinasi telah tertata dengan baik, terutama berkaitan dengan koordinasi antara kementerian-kementerian terkait.

Tabel 1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres 2024

No	Pihak	Tahapan
1	Kemenlu, KPU	Penyerahan Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU dan WNI bertempat tinggal di luar negeri dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU
2	Kemenlu, Kemendagri	Sinkronisasi Data Kependudukan dan Data WNI di luar negeri
3	KPU	Penyerahan Daftar Potensial Pemilih Lokasi khusus dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi
4	Kemenlu, Kemendagri, KPU	Penyerahan DP4 oleh Menteri Dalam Negeri dan DP4LN oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU
5	KPU	Penyandingan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 hasil sinkronisasi dan Penyandingan DPTLN Pemilu terakhir dengan DP4LN hasil sinkronisasi oleh KPU
6	KPU, PPLN	Penyerahan Data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Penyerahan Data Pemilih Luar Negeri dari KPU ke PPLN
7	KPU	Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian
8	KPU	Pencocokan dan Penelitian
9	KPU	Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan DPS/DPSLN
10	KPU	Pengumuman DPS/DPSLN dan Masukan/Tanggapan Masyarakat, Pengawas dan Peserta Pemilu
11	KPU	Perbaikan DPS/DPSLN
12	KPU	Pengumuman DPSHP/DPSHPLN dan Masukan/Tanggapan Masyarakat, Pengawas dan Peserta Pemilu
13	KPU	Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan DPT/DPTLN
14	KPU	Pengumuman DPT
15	KPU	Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan

Sumber: Betty Epsilon Idroos, Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, KPU RI, 30 Oktober 2022

Persoalan koordinasi antar lembaga telah coba untuk diatur dengan menempatkan aktor mana melakukan apa dan melakukan koordinasi dengan lembaga apa. Persoalan yang perlu untuk diperhatikan kemudian ada pada faktor non teknis, yakni kesalahan pada SDM. Apabila kita melihat perkembangan data DPB (tabel 2) dan dan DAK2 (tabel 3), terdapat selisih yang cukup besar, hal ini yang perlu diverifikasi, terutama mengingat keduanya berpatokan pada data yang berbeda. DPB merujuk pada pemilih, dan DAK2 merujuk pada penduduk.

Tabel 2. Perkembangan Daftar Pemilih Berkelanjutan Hingga Semester II Tahun 2022

No.	Provinsi	DPB Semester II 2021	DPB Semester II 2022	Selisih
		Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih	
1	Aceh	3.543.986	3.545.271	1.285
2	Sumatera Utara	9.827.473	9.815.138	-12.335
3	Sumatera Barat	3.712.791	3.710.316	-2.475
4	Riau	3.931.295	3.931.295	-1.323
5	Jambi	2.427.062	2.400.552	-26.510
6	Sumatera Selatan	5.904.114	5.855.515	-48.599
7	Bengkulu	1.376.567	1.372.919	-3.648
8	Lampung	5.973.779	5.873.741	-100.038
9	Kepulauan Bangka Belitung	970.628	967.749	-2.879
10	Kepulauan Riau	1.176.971	1.170.135	-6.836
11	DKI Jakarta	7.863.012	7.891.416	28.404
12	Jawa Barat	33.397.858	33.371.611	-26.247
13	Jawa Tengah	27.628.516	27.529.690	-98.826
14	D.I. Yogyakarta	2.687.953	2.675.147	-12.806
15	Jawa Timur	30.809.477	30.710.067	-99.410
16	Banten	8.179.547	8.179.256	-291
17	Bali	3.085.522	3.077.507	-8.015
18	Nusa Tenggara Barat	3.730.186	3.723.295	-6.891
19	Nusa Tenggara Timur	3.487.661	3.491.376	3.715
20	Kalimantan Barat	3.677.885	3.647.700	-30.185
21	Kalimantan Tengah	1.706.306	1.714.356	8.050
22	Kalimantan Selatan	2.796.440	2.774.798	-21.642
23	Kalimantan Timur	2.496.447	2.466.571	-29.876
24	Kalimantan Utara	428.572	429.774	1.202
25	Sulawesi Utara	1.852.777	1.839.959	-12.818
26	Sulawesi Tengah	2.039.701	2.039.701	-4.118
27	Sulawesi Selatan	6.124.467	6.125.226	759
28	Sulawesi Tenggara	1.750.537	1.745.288	-5.249
29	Gorontalo	833.096	814.780	-18.316
30	Sulawesi Barat	890.990	891.449	459
31	Maluku	1.355.876	1.336.011	-19.865
32	Maluku Utara	801.924	747.262	-54.662
33	Papua	3.451.321	3.433.034	-18.287
34	Papua Barat	738.611	729.705	-8.906
Total		190.659.348	190.022.169	-637.179

Sumber: Betty Epsilon Idroos, Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, KPU RI, 30 Oktober 2022

Selisih data tentu berpotensi untuk menjadi bahan sengketa, hanya saja memang salah satu langkah penting untuk melakukan sinkronisasi adalah dengan mengedepankan transparansi proses. Proses yang transparan perlu untuk didukung oleh partisipasi masyarakat aktif. Pertaruhan dari proses ini ada pada legitimasi pemilu yang dilakukan di masa mendatang.

Tabel 3. Data Agregat Kependudukan (DAK2) Semester I tahun 2022

Kode	Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Total
11	Aceh	2.691.209	2.688.728	5.379.937
12	Sumatera Utara	7.666.710	7.666.710	15.305.230
13	Sumatera Barat	2.822.418	2.801.725	5.624.143
14	Riau	3.394.578	3.251.812	6.646.390
15	Jambi	1.853.480	1.789.283	3.642.763
16	Sumatera Selatan	4.403.279	4.243.407	8.646.686
17	Bengkulu	1.044.836	1.002.274	2.047.110
18	Lampung	4.553.556	4.348.010	8.901.566
19	Kepulauan Bangka Belitung	753.871	718.556	1.472.427
21	Kepulauan Riau	1.068.834	1.032.381	2.101.215
31	DKI Jakarta	5.645.916	5.603.669	11.249.585
32	Jawa Barat	24.628.466	24.008.714	48.637.180
33	Jawa Tengah	18.863.156	18.625.121	37.488.277
34	D.I. Yogyakarta	1.819.826	1.857.696	3.677.522
35	Jawa Timur	20.521.843	20.622.224	41.144.067
36	Banten	6.169.313	5.975.848	12.145.161
51	Bali	2.149.392	2.137.801	4.287.193
52	Nusa Tenggara Barat	2.727.377	2.746.130	5.473.507
53	Nusa Tenggara Timur	2.757.448	2.756.768	5.514.216
61	Kalimantan Barat	2.817.151	2.664.895	5.482.046
62	Kalimantan Tengah	1.380.678	1.292.112	2.672.790
63	Kalimantan Selatan	2.092.119	2.049.414	4.141.533
64	Kalimantan Timur	2.017.337	1.874.512	3.891.849
71	Sulawesi Utara	1.362.527	1.301.786	2.664.313
72	Sulawesi Tengah	1.577.983	1.496.975	3.074.958
73	Sulawesi Selatan	4.591.593	4.664.337	9.255.930
74	Sulawesi Tenggara	1.361.683	1.329.108	2.690.791
75	Gorontalo	607.075	596.846	1.203.921
76	Sulawesi Barat	735.117	712.069	1.447.186
81	Maluku	950.317	936.418	1.886.735
82	Maluku Utara	688.374	648.994	1.337.368
91	Papua	2.307.032	2.049.992	4.357.024
92	Papua Barat	604.383	556.645	1.161.028
65	Kalimantan Utara	371.119	338.501	709.620
Total		138.999.996	136.361.271	275.361.267

Sumber: Betty Epsilon Idroos, Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, KPU RI, 30 Oktober 2022

C. Pemecahan Masalah

Ketegangan pasca pemilu 2014 dan 2019 harus dihindarkan, salah satunya dengan tetap menjaga legitimasi pemilu melalui keterbukaan pelaksanaan pemilu. Keterbatasan persoalan SDM dapat diatasi dengan cara memperjelas lembaga-lembaga yang berinteraksi dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih. Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk tetap memastikan bahwa proses pemutakhiran ini diawasi oleh beragam pihak. Partisipasi masyarakat dapat menjadi jembatan bagi tantangan-tantangan kultural, seperti penolakan masyarakat ketika proses penelitian dan pencocokan (coklit).

Hal lain yang perlu untuk diperhatikan ada pada peluang untuk menggunakan Satu Data Kependudukan Indonesia.¹⁹ Penguatan data kependudukan oleh Kemendagri menjadi agenda krusial, terutama untuk memastikan tidak hanya hak-hak politik warga negara terjamin, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar lainnya, seperti pemberian jaminan kesehatan hingga pendidikan. Sistem satu warga negara satu nomor identitas (*identity number*) yang terintegrasikan dengan beragam informasi warga negara tersebut, menjadi kunci utama akselerasi berbagai kehidupan bernegara. Penerapan ini krusial, hanya saja perlu dibutuhkan regulasi yang menjamin perlindungan data pribadi, sehingga tidak digunakan semena-mena oleh negara maupun korporasi.

Perkembangan teknologi menjadi peluang penting bagi akselerasi integrasi data hingga proses ruang partisipasi bagi warga negara. Penggunaan ruang digital memungkinkan pengawasan dilakukan tanpa terkendala oleh kondisi geografis. Ruang digital turut menjadi ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil, sehingga perlu literasi digital yang kuat dari warga negara.²⁰ Persoalannya, belum semua wilayah di Indonesia memiliki infrastruktur internet yang memadai, oleh karenanya perlu untuk memperkuat pengawasan berbasis masyarakat dengan memperkuat ikatan-ikatan kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap pemilu.

D. Penutup dan Saran

Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat persoalan institusional yang disebabkan oleh kapasitas pemerintahan di tingkat pusat dan daerah terkait dengan pendataan penduduk. Di sisi lain, terdapat pula persoalan SDM yang berakibat pada tidak akuratnya data yang dimasukkan ke dalam sistem. Di masa mendatang perlu untuk dibuka ruang implementasi satu warga negara satu nomor identitas (*identity number*) serta perlunya pendekatan sosial-budaya dan teknologi untuk menjamin kepercayaan pada data (reliabilitas) dalam proses pendataan.

¹⁹ Program Satu Data Kependudukan Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, terutama mengingat pengumpulan data di BPS telah mengacu pada satuan wilayah RT/RW dan terintegrasi dengan data Base Dirjen-Dukcapil. Proses yang paling perlu untuk dilakukan adalah proses validasi dari data-data yang telah masuk. Terutama saat ini KPU juga telah merancang sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) yang dilakukan secara berjenjang. Lihat: Nano Suharno, Pilkada, Data Penduduk, dan Pemilu, <https://news.detik.com/kolom/d-5192666/pilkada-data-penduduk-dan-pemilih>, 29 September 2020

²⁰ Bawaslu DIY, Literasi Digitalisasi Melawan Hoax, <https://yogyakarta.bawaslu.go.id/publikasi-literasi-digitalisasi-melawan-hoax>, 10 November 2022

Ruang digital perlu untuk dimanfaatkan sebagai ruang pengawasan dan partisipasi politik, meski infrastruktur internet tidaklah seimbang. Kekurangan infrastruktur internet yang timpang dapat diatasi dengan mengedepankan keterlibatan kelompok masyarakat sipil di wilayah tersebut untuk mengawasi proses. Keberadaan BAWASLU juga perlu untuk diapresiasi, mengingat hingga saat ini nampaknya tidak ada lembaga lain yang sepadan dengan BAWASLU di bidang pemilihan. BAWASLU dapat menjadi faktor pendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu.

E. Daftar Pustaka

- Bawaslu DIY, Literasi Digitalisasi Melawan Hoax,
<https://yogyakarta.bawaslu.go.id/publikasi-literasi-digitalisasi-melawan-hoax>,
10 November 2022
- Betty Epsilon Idroos, Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, 30 Oktober 2022
- CNN Indonesia, Gugatan Prabowo ke MK di 2014 dan 2019, Serupa tapi Tak Sama,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190612132836-32-402673/gugatan-prabowo-ke-mk-di-2014-dan-2019-serupa-tapi-tak-sama>, 13 Juni 2019
- Detik, Tetap Kondusif KPK Periksa Lukas Enembe Meski Dijaga Simpatisan Berpanah,
<https://www.detik.com/susel/hukum-dan-kriminal/d-6386758/tetap-kondusif-kpk-periksa-lukas-enembe-meski-dijaga-simpatisan-berpanah>, 4 November 2022
- Hernán Pablo Toppi. Guillermo O'Donnell and his contribution to the development of democracy in Latin America since the third wave of democratization. *Revista IUS*, 2018, 12.42: 9-28
- Larry Diamond, et al. (ed.). Consolidating the third wave democracies. JHU Press, 1997
- Muhammad Husni Thamrin, Muhammad Arifin Nasution, & Faiz Albar Nasution. Problematik Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan. *Jurnal Sosial Politik*, 2020, 6.2: 157-167.
- Muhammad Imam Subhki. Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 2020, 16.2: 137-154.
- Nano Suharno, Pilkada, Data Penduduk, dan Pemilih, <https://news.detik.com/kolom/d-5192666/pilkada-data-penduduk-dan-pemilih>. 29 September 2020

- Nico Kresna Wibowo, Rahayu Sulistiowati, & Eko Budi Sulistio. Koordinasi Stakeholder Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak di Indonesia (Studi di Kota Bandar Lampung Tahun 2019). *Jurnal Administrativa*, 2020, 2.1: 45-62.
- Pippa Norris, Alessandro Nai (ed.). *Election watchdogs: transparency, accountability and integrity*. Oxford University Press, 2017.
- Pippa Norris. The new research agenda studying electoral integrity. *Electoral Studies*, 2013, 32.4, 563-575.
- Populi Center, Evaluasi 3 Tahun Kinerja Joko Widodo - KH. Ma'ruf Amin dan Dinamika Politik Menjelang Pemilu 2024, <https://populicenter.org/2022/10/26/evaluasi-tiga-tahun-kinerja-joko-widodo-kh-maruf-amin-dan-dinamika-politik-menjelang-pemilu-2024/>, 19 Oktober 2022
- Rahmad Nuryadi Putra & Hasanuddin. *Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015*. 2017. PhD Thesis. Riau University.
- Rex Brynen, et al. *Beyond the Arab spring: authoritarianism & democratization in the Arab world*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2012
- Samuel P Huntington. *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma press, 1993
- Scott Schraufnagel, Michael Buehler, & Maureen Lowry-Fritz. Voter turnout in democratizing Southeast Asia: A comparative analysis of electoral participation in five countries. *Taiwan Journal of Democracy*, July. 2014.
- Weriza, Asrinald, & Ernita Arif. Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada di Kota Padang Panjang. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 2019, 20.2: 213-222.